

Mengklaim Ruang Publik: Analisis Awal Mengenai Non-gerakan Perempuan Aceh di Warung Kopi di Aceh

Baiquni Hasbi

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Abstract: This article discusses the significant role of Acehnese women in reshaping and claiming public spaces, with a specific focus on their participation in coffee shops as a case study. Employing a qualitative approach, the research analyzes the impact of disasters, the narratives of Acehnese recovery, and the influence of cultural values, as well as political and economic factors, on the women's movement in Aceh. Data collection involved literature review and document analysis. This initial analysis applies the concept of social non-gerakan to reveal how Acehnese women, without being driven by consistent ideologies or leadership, have influenced the transformation of public spaces in post-disaster Aceh. Despite facing criticism and regulations, the courage of Acehnese women in asserting their presence in public spaces has led to significant social changes in Aceh. This study highlights the importance of understanding the role of women in the transformation of public spaces and its implications for gender inclusivity in Acehnese society.

Article History

Received: 18 December 2022

Revised: 27 October 2023

Published: 31 December 2023

Key Words:

Acehnese Woman, Public Space, Social non-Movement, Coffee House

Copyright

© Saree, Baiquni Hasbi

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



 <https://doi.org/10.47766/saree.v5i2.1036>

 Corresponding Author: baiquni@iainlhokseumawe.ac.id

Abstrak: Artikel ini membahas peran penting perempuan Aceh dalam mengubah dan mengklaim ruang publik, dengan fokus pada partisipasi mereka di warung kopi sebagai studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis dampak bencana, narasi perbaikan Aceh, dan pengaruh nilai-nilai budaya serta faktor-faktor politik dan ekonomi terhadap gerakan perempuan Aceh. Data dikumpulkan melalui penelitian literatur, dan analisis dokumen. Analisis awal ini mengaplikasikan konsep sosial non-gerakan untuk mengungkapkan bagaimana perempuan Aceh, tanpa didorong oleh ideologi atau kepemimpinan yang konsisten, telah mempengaruhi transformasi ruang publik di Aceh pasca-bencana. Meskipun menghadapi kritik dan regulasi, keberanian perempuan Aceh dalam mempertahankan kehadiran mereka di ruang publik telah memunculkan perubahan sosial yang signifikan di Aceh. Penelitian ini menggambarkan pentingnya memahami peran perempuan dalam transformasi ruang publik serta implikasinya terhadap inklusivitas gender dalam masyarakat Aceh

Kata Kunci:

Perempuan Aceh, Ruang Publik, Non-gerakan Perempuan, Warung Kopi

PENDAHULUAN

Gambaran tentang Aceh dan perempuan Aceh, sejak awal abad ke-21 dan terutama pasca-bencana sejak tahun 2005, dalam banyak media nasional dan internasional, umumnya negatif. Aceh digambarkan sebagai tempat yang mengerikan untuk tinggal dan perempuan yang tinggal di Aceh adalah korban baik dari implementasi hukum Islam maupun masyarakat patriarki.

Kesimpulan serupa juga muncul dari banyak lingkaran akademis nasional dan Aceh. Poros Darussalam, misalnya, memberi judul catatan akhir tahun 2018 dengan pertanyaan "Aceh 2018: Lebih Gelap dan Lebih Sempit?". Catatan tersebut membahas masalah-masalah Aceh yang kompleks dan belum terpecahkan yang meliputi politik, ekonomi, gender, identitas, dan korupsi. Meskipun judulnya menyarankan sebuah kesimpulan terbuka, namun, kontennya menunjukkan sisi 'lebih gelap' dan 'lebih sempit' dari Aceh. Dalam bagian mengenai perempuan, catatan tersebut menggambarkan bagaimana jalan perempuan Aceh menuju kesetaraan gender masih panjang dan sulit (Poros Darussalam, 2018).

Artikel ini tidak bermaksud sepenuhnya menolak catatan akhir tahun, karena Aceh tentu memiliki masalah seperti yang dibahas di dalamnya. Artikel ini bertujuan untuk menyoroti sisi lain dari Aceh yang belum dibahas atau mungkin kurang dihargai oleh banyak pengamat sehingga Aceh dapat dilihat sebagai kurang gelap atau sempit.

Pada akhir tahun 2004, Aceh, provinsi paling barat Indonesia, dilanda Tsunami yang menghancurkan sebagian besar wilayah pesisirnya. Di antara semua wilayah di Aceh, Banda Aceh dan Meulaboh adalah area yang paling terdampak dengan ratusan ribu orang tewas dan terdampar. Di satu sisi, ini sangat menghancurkan bagi banyak korban, tetapi di sisi lain, berkat banyak donor dan organisasi nasional dan internasional, ini telah mengubah Aceh dalam banyak hal melalui program rekonstruksi dan rehabilitasi dari tahun 2005 hingga 2009.

Secara singkat, bencana tersebut mempercepat perjanjian perdamaian atau yang dikenal sebagai MoU (Memorandum of Understanding) Helsinki antara pihak-pihak yang bertikai; Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia pada Agustus 2005. Perjanjian tersebut mengakhiri konflik tiga puluh tahun, dari 1976 hingga 2005. Secara lebih panjang, program rekonstruksi dan rehabilitasi juga secara signifikan mengubah kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh baik yang secara langsung maupun tidak langsung terdampak oleh Tsunami (Daly, Patrick, R. Michael Feener, and Anthony Reid, 2012). Misalnya, dibandingkan dengan sebelum bencana, saat ini perempuan Aceh lebih hadir di banyak ruang publik. Mereka menduduki ruang yang sebelumnya hanya didominasi oleh pria, mulai dari pedagang jalanan, pekerja pom bensin (SPBU) hingga pemimpin politik. Dengan ini, perempuan Aceh berhasil mengubah ruang publik yang sebelumnya hanya didominasi oleh pria menjadi ruang heteroseksual.

Dalam artikel ini, penulis akan menggunakan kedai kopi di Banda Aceh sebagai contoh ruang publik yang diubah oleh perempuan Aceh. Pertanyaan penting artikel ini adalah bagaimana perempuan Aceh berhasil mengubah ruang tersebut ketika mereka terpinggirkan baik selama konflik maupun setelah perjanjian perdamaian (Lee-Koo, 2012)?

Artikel ini mengulas tentang bagaimana aktivitas sehari-hari dan kekuatan perempuan Aceh berperan dalam mengubah Aceh pasca-bencana.

Dengan memperkenalkan konsep "non-gerakan" sebagai kerangka analisis, artikel ini menyoroti perubahan yang terjadi melalui tindakan kolektif tanpa struktur formal atau hierarki. Perempuan Aceh diketengahkan dalam kemampuannya mengklaim ruang publik tanpa terikat pada gerakan formal atau organisasi, sambil menekankan variabel-variabel kontingen lain yang memengaruhi kemampuan perempuan tersebut. Faktor-faktor tersebut mencakup perjanjian perdamaian antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, formalisasi Hukum Islam pada tahun 2002, budaya matrifokal Aceh, dan proyek modernisasi yang dimulai pada masa kepresidenan Suharto pada tahun 1967.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis peran perempuan Aceh dalam mengklaim ruang publik, dengan penekanan pada partisipasi mereka di warung kopi sebagai studi kasus. Data dikumpulkan melalui berbagai sumber, termasuk literatur akademis, artikel berita, rekaman wawancara dari sumber-sumber sekunder (Creswell, 2015).

Informasi mengenai kondisi sebelum dan sesudah bencana serta upaya pemulihan Aceh diperoleh melalui studi literatur yang mencakup penelusuran dokumen dan observasi lapangan singkat. Analisis awal dilakukan untuk memahami bagaimana non-gerakan perempuan Aceh, terutama dalam konteks partisipasi mereka di warung kopi, telah membentuk ruang publik di Aceh pasca-bencana. Pendekatan ini melibatkan interpretasi teks, identifikasi pola-pola, dan pemahaman konteks budaya dan sosial di Aceh.

Dalam pengembangan artikel ini, dilakukan sintesis dan penafsiran terhadap berbagai sumber informasi untuk menggambarkan gambaran yang komprehensif tentang peran perempuan Aceh dalam transformasi ruang publik. Meskipun penelitian ini berfokus pada non-gerakan perempuan di warung kopi, namun upaya dilakukan untuk memperluas cakupan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perubahan sosial dan gender di Aceh.

Meskipun terdapat keterbatasan akses terhadap data primer, terutama dalam hal wawancara langsung dengan perempuan Aceh di lapangan,

pendekatan kualitatif yang digunakan memberikan wawasan mendalam tentang dinamika perubahan sosial yang terjadi di Aceh, khususnya dalam konteks partisipasi perempuan di ruang publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Matrifokal, Modernitas dan Modernitas

Agensi perempuan Aceh tidaklah pasif dan diam. Namun, agensi mereka tidak mengikuti kerangka agensi 'Euro-Amerika', melainkan diartikulasikan sebagai bentuk feminisme lokal yang asli. Kadang-kadang mereka terlihat secara publik, tetapi pada waktu lain, mereka juga dapat secara publik tersembunyi merespons kondisi yang mereka hadapi (Afrianty, 2015; Siapno, 2013). Beberapa tokoh terkenal yang menggambarkan agensi perempuan Aceh adalah empat ratu yang memerintah Kesultanan Aceh selama hampir setengah dekade, Cut Nyak Dhien dan Cut Meutia yang memimpin perang gerilya Aceh melawan Belanda, dan Inong Balee, sebuah pasukan yang terdiri dari janda yang bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka (Khan, 2018; Siapno, 2013).

Selama konflik Aceh-Indonesia (1979 - 2005), mereka bahkan berhasil aktif terlibat di ruang-ruang di mana agensi laki-laki terbatas atau direpresi (Siapno, 2013). Hari ini, mereka juga hadir sebagai Anggota Parlemen Aceh dan bahkan menjadi wali kota Banda Aceh (Mardhiah et al., 2018). Kemampuan mereka untuk menegakkan agensi mereka dapat dipahami dari dua konteks; budaya matrifokal Aceh, modernitas, dan juga proses demokratisasi setelah jatuhnya rezim Suharto pada tahun 1998.

Aceh, seperti beberapa etnis lain di Indonesia, seperti Minangkabau, dikenal dengan budaya matrifokalnya. Menurut Tanner, matrifokalitas tidak hanya merujuk pada "fokus pada ibu" tetapi juga menyarankan "1) sistem kekerabatan di mana (a) peran ibu secara struktural, budaya, dan afektif sentral dan (b) kepentingan multidimensional ini sah; dan (2) masyarakat di mana fitur-fitur ini bersamaan, di mana (a) hubungan antara jenis kelamin relatif egaliter dan (b) baik perempuan maupun laki-laki merupakan aktor penting di ranah ekonomi dan ritual (Tanner, 1974). Sebagai contoh, di Aceh secara tradisional, anak laki-laki tidak memiliki ruang di rumah keluarga mereka, karena diharapkan mereka tidur di Meunasah (Masjid Kecil) terdekat.

Ada juga aturan tidak tertulis bagi orang tua untuk menyediakan rumah bagi putri mereka setelah menikah, dan seorang suami diharapkan pindah ke rumah mertuanya, jika dia belum memiliki rumah sendiri. Matrifokalitas di Aceh juga memberi kekuatan kepada perempuan untuk memimpin beberapa ritual tradisional di ruang publik.

Matrifokalitas ini, menurut Tanner, ada karena perempuan menghabiskan lebih banyak waktu di desa mereka karena suami mereka bekerja jauh dari rumah, sehingga perempuan harus mengelola ekonomi rumah tangga mereka. Ketika pergi, laki-laki mengendalikan penghasilan dan ketika mereka pulang, mereka diharapkan menyerahkan penghasilan kepada perempuan mereka. Akibatnya:

"Anak-anak melihat bahwa ibu mereka yang memberi makan mereka, menginstruksikan mereka, dan memanjakan mereka. Mereka melihat ibu mereka sebagai sosok yang bertanggung jawab dan penting yang bekerja keras, dihormati di desa secara umum, dan mengurus sebagian besar urusan keluarga. Kerabat ibu ada di dekat; tetapi kerabat ayah lebih jauh." Kondisi seperti ini juga memberi perempuan Aceh lebih banyak kemampuan untuk bergerak dengan mudah antara ruang di komunitas mereka (Tanner, 1974).

Namun, proyek modernisasi dan urbanisasi yang diterapkan oleh negara Indonesia pada tahun 1967 mempengaruhi praktik matrifokalitas di Aceh. Efek ini disebabkan oleh dua gaya modernitas yang simultan; pembangunan ekonomi dan "ibuisme" negara. Pertama, munculnya model keluarga ala Barat dan perkembangan pasar yang meningkatkan disintegrasi beberapa ikatan matrilineal. Anak-anak Aceh memutuskan untuk pindah dari rumah mereka untuk mencari pekerjaan di banyak daerah perkotaan. Akibatnya, ketika seorang putri menikah, mereka tidak akan tinggal bersama orang tua mereka tetapi dengan keluarga inti mereka sendiri. Kondisi ini mengurangi peran dominan ibu dan keluarga maternalnya (Srimulyani, 2010).

Kedua, bersamaan dengan modernisasi, negara Indonesia juga membawa ideologi gender berbasis nilai Jawa priyayi, di mana nilai 'kelembutan' lebih ditekankan sehingga domestikasi perempuan menjadi alami (Suryakusuma, 1988). Ini, berarti menandakan dua hal, pertama, bahwa satu-satunya ruang 'yang pantas' bagi perempuan adalah di rumah dan kedua, itu mengurangi kekuatan perempuan Aceh sebagai saudara perempuan dan

putri sehingga menekankan peran lebih besar ayah sebagai kepala rumah tangga (Balawyn, 2017).

Selain itu, proyek modernisasi, meskipun diperkenalkan oleh negara, memiliki dampak lebih besar di daerah perkotaan, seperti Banda Aceh, daripada di daerah pedesaan, seperti Pidie. Oleh karena itu, seperti yang diamati oleh Siapno dari awal hingga pertengahan 1990-an, peran, ruang, dan mobilitas perempuan Aceh jauh lebih nyata dan lancar di Pidie, dibandingkan dengan Banda Aceh. Dia juga menemukan bahwa budaya patriarki dan praktik segregasi gender jauh lebih banyak di perkotaan dan hampir tidak ada di daerah pedesaan. Namun demikian, modernisasi, pada saat yang sama, juga membawa perbaikan bagi perempuan. Menurut Brenner, dari tahun 1970-an hingga 1990-an, terjadi peningkatan tingkat pendidikan dan tingkat melek huruf baik untuk laki-laki maupun perempuan, ekspansi kelas menengah, dan standar hidup yang lebih tinggi secara umum bagi masyarakat Indonesia (Brenner et al., 2005).

Jatuhnya Suharto pada tahun 1998 langsung mempengaruhi Aceh dalam dua hal. Pertama, itu membuka proses demokratisasi di Indonesia. Kedua, sebagai cara untuk meredakan konflik Indonesia-Aceh, pemerintah Indonesia memberikan Aceh sebagai provinsi otonom dengan hak yang lebih besar untuk mengatur dirinya sendiri dan juga memungkinkan Pemerintah Aceh untuk secara resmi mengadopsi dan menerapkan hukum Islam. Proses demokratisasi dan otonomi untuk Aceh memungkinkan mobilitas yang lebih luas dan kemampuan bagi LSM di Aceh untuk melindungi perempuan, mempromosikan kesetaraan, memastikan perempuan memiliki hak-hak mereka dalam bidang ekonomi, sosial-budaya, kewarganegaraan, dan politik.

Kemampuan dan mobilitas seperti itu hampir tidak ada selama masa Suharto. Misalnya, ketika Suraiya Kamaruzzaman mendirikan Flower Aceh pada tahun 1989, dia harus menggunakan nama yang sangat 'feminin' sebagai penyamaran dari LSM tersebut bagi militer Indonesia. Dengan demikian, dia bisa terus berbicara tentang masalah pelanggaran hak asasi manusia di tingkat nasional dan internasional di mana perempuan Aceh paling menderita (Siapno, 2013).

Setelah tahun 1998, pers menikmati kebebasan lebih banyak sehingga laporan lebih banyak pelanggaran hak asasi manusia menjadi mungkin. Namun, meskipun membuka ruang baru bagi LSM lokal untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, penderitaan perempuan tidak berhenti setelah jatuhnya Suharto karena konflik Indonesia-Aceh belum berakhir. Perempuan masih sering diperkosa dan disalahgunakan untuk mengintimidasi dan merendahkan laki-laki Aceh. Konflik juga memaksa laki-laki melarikan diri dari rumah tangga mereka sehingga membalikkan peran gender di rumah tangga di mana perempuan harus menjadi kepala rumah tangga dan pemimpin masyarakat. Kondisi seperti ini menciptakan efek ganda bagi perempuan, di satu sisi, mereka harus memainkan peran ganda di rumah tetapi di sisi lain, mereka juga memiliki lebih banyak kebebasan dari suami mereka (Siapno, 2013).

Selain itu, formalisasi hukum Islam di Aceh sejak itu juga menimbulkan tantangan bagi perempuan Aceh. Otonomi Aceh juga memungkinkan otoritas agama laki-laki mencoba membatasi ruang perempuan di ranah publik sehingga mengembalikannya ke ranah domestik. Merespons kondisi seperti itu, Kongres Perempuan Aceh (*Duek Pakat Inong Aceh* atau DPIA) diselenggarakan pada tahun 2000 untuk menunjukkan posisi politik mereka mengenai konflik dan juga formalisasi hukum Islam. Mereka menuntut bahwa semua pihak yang bertikai harus mengakhiri konflik dan penciptaan Forum Hukum Perempuan Aceh (*Qanun Ureung Inong Aceh*) yang bertujuan untuk menemukan interpretasi Islam egaliter untuk meningkatkan posisi perempuan di ruang publik (Afrianty, 2015). Berkat upaya mereka, formalisasi hukum Islam di Aceh tidak sepenuhnya menghambat mobilitas dan penampilan perempuan Aceh di ruang publik.

Perempuan Aceh Pasca-Bencana

Dalam konteks pasca-bencana, dampak langsung Tsunami terhadap Banda Aceh adalah pengurangan 44% dari total populasi dan pengungsian mayoritas korban selamatnya (BPS, 2008). Banyak korban selamat di Banda Aceh entah harus pindah ke rumah kerabat mereka atau tinggal di barak-barak sementara. Sementara dari aspek sosial-politik, bencana tersebut

memicu negosiasi perdamaian antara Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada Januari 2005. Pada 15 Agustus 2005, setelah serangkaian negosiasi intens, Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka akhirnya mencapai kesepakatan damai yang diadakan di Helsinki, kemudian dikenal sebagai *Memorandum of Understanding Helsinki* (MoU Helsinki). Perjanjian perdamaian ini merupakan elemen penting untuk memastikan bahwa program rekonstruksi dan rehabilitasi dapat berjalan secara efektif baik oleh lembaga-lembaga nasional maupun internasional.

Selain dua dampak langsung tersebut, bencana juga memperkuat apa yang disebut Samuel sebagai "naratif perbaikan" Aceh. Naratif tersebut terdiri dari dua kerangka besar; yaitu perbaikan moral dan religius, dan 'pembangunan' sosial-ekonomi. Yang pertama dibentuk oleh konsep apokaliptik waktu di mana dunia akan berakhir sehingga tindakan saat ini harus sesuai dengan kerangka moral dan religius. Sementara yang kedua didasarkan pada temporalitas pembangunan yang abadi (Samuels, 2016).

Dengan adanya naratif perbaikan tersebut, Aceh pasca-bencana menyaksikan proyek 'rekayasa sosial' yang ambisius berdasarkan imajinasi masa depan masyarakat Islam yang dipimpin oleh negara Aceh. Negara memiliki sikap ambivalen terhadap donor internasional. Di satu sisi, mereka mendukung proyek pembangunan ekonomi, politik, dan sosial mereka, tetapi di sisi lain, mereka percaya bahwa bersama dengan bantuan itu, lembaga-lembaga internasional juga membawa proyek globalisasi 'Barat' sehingga negara harus melindungi Aceh dari ancaman degradasi moral (Daly, Patrick, R. Michael Feener, and Anthony Reid, 2012).

Masyarakat Aceh juga merefleksikan naratif semacam itu setelah tsunami. Mereka memiliki harapan besar bahwa pendidikan dan ekonomi mereka akan menjadi lebih baik sehingga mereka akan memiliki lebih banyak peluang kerja dan menjadi lebih makmur. Banyak perempuan dan laki-laki muda membayangkan diri mereka memiliki peluang lebih besar untuk mengejar studi, memulai bisnis, dan menikmati gaya hidup kelas menengah.

Imajinasi semacam itu terinspirasi oleh citra gaya hidup kelas menengah yang disebarkan melalui televisi tetapi juga didorong oleh industri rekonstruksi pasca-bencana yang membawa kedai kopi, mobil, pusat perbelanjaan ber-AC (Samuels, 2016). Namun, naratif ini tidak hanya muncul

khususnya setelah tsunami, tetapi juga terjadi selama periode konflik. Menurut wawancara Siapno, perempuan di Woyla, salah satu daerah pedesaan di bagian barat Aceh, telah menyatakan keinginan mereka kepada orang tua mereka untuk tidak dinikahkan pada usia dini dan membiarkan mereka mengejar tingkat pendidikan yang lebih baik dan lebih maju (Siapno, 2013).

***Non-Movement* Perempuan Aceh**

Setelah bencana, saya percaya bahwa naratif perbaikan telah menjadi lebih intensif di seluruh Aceh. Mengetahui bahwa Banda Aceh telah bertransformasi menjadi salah satu wilayah yang paling terurbanisasi di Aceh, sehingga banyak orang di daerah pedesaan bermigrasi ke Banda Aceh dengan harapan memperbaiki kehidupan mereka.

Ada setidaknya dua alasan utama yang mendorong orang bermigrasi ke Banda Aceh. Pertama, Banda Aceh memiliki dua universitas penting di Aceh; Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Universitas Syiah Kuala. Hingga sebelum bencana, kedua universitas tersebut adalah produsen utama, meskipun bukan satu-satunya, lulusan di Aceh. Saat ini, ada lebih banyak universitas yang bermunculan di berbagai daerah di Aceh, namun dua universitas di Banda Aceh masih mendominasi jumlah lulusan di Aceh. Kedua, kota ini juga menyediakan lebih banyak peluang kerja karena perkembangan ekonomi yang pesat setelah bencana (Sambijantoro & Simanjuntak, 2015). Setelah para migran ini menetap di Banda Aceh, mereka akan menginspirasi atau mengundang kerabat mereka dari daerah pedesaan untuk pindah ke Banda Aceh. Oleh karena itu, tidak mengherankan melihat peningkatan populasi Banda Aceh mulai dari tahun 2007 hingga saat ini. Migrasi yang meningkat kemudian memicu perubahan sosial di Banda Aceh (Banda Aceh dalam Angka Tahun 2008, 2008).

Migrasi mereka ke Banda Aceh memisahkan perempuan-perempuan ini dari kendali walinya. Ditambah dengan kebiasaan matrifokal mereka di daerah pedesaan yang juga memungkinkan mereka untuk bergerak dengan mudah di antara ruang-ruang di Banda Aceh. Dua faktor ini tentu saja memberikan mereka lebih banyak kebebasan untuk bergerak dan menduduki beberapa ruang di Banda Aceh. Oleh karena itu, melalui kegiatan sehari-hari

mereka, mereka berhasil menantang kode-kode hukum dan moral yang ada, yang memfasilitasi mereka untuk menuntut hak-hak mereka. Setiap tuntutan yang berhasil mereka buat akan menjadi dasar untuk tuntutan lebih lanjut untuk meningkatkan hak-hak gender.

Bagi perempuan Aceh, yang sudah bermimpi untuk memiliki kehidupan yang lebih baik bahkan sebelum tsunami terjadi, pindah dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan adalah langkah pertama mereka untuk mencapai impian mereka. Gerakan mereka mewakili apa yang disebut Asef Bayat sebagai non-gerakan. Bayat mendefinisikan non-gerakan sebagai:

"... aksi kolektif dari aktor-aktor non-kolektif; mereka mencerminkan praktik bersama dari sejumlah besar orang biasa yang kegiatan-kegiatan mereka yang terfragmentasi namun seragam yang kemudian memicu banyak perubahan sosial, meskipun praktik-praktik ini jarang dipandu oleh ideologi atau kepemimpinan atau organisasi yang dapat dikenali ... (Bayat, 2013)."

Non-gerakan perempuan Aceh tidak bermaksud menyebabkan perubahan sosial karena gerakan mereka tidak mewakili ideologi tertentu dan dipimpin oleh tokoh atau organisasi feminis tertentu. Bagi mereka, mereka hanya melakukan kegiatan sehari-hari yang biasa seperti pergi ke sekolah, universitas, bekerja, atau bahkan menghabiskan waktu dengan teman-teman mereka di tempat-tempat tongkrongan. Namun, melalui mobilitas sehari-hari, mereka tidak terhindarkan menciptakan perubahan sosial.

Kekuatan non-gerakan perempuan terletak pada dua hal: tindakan yang tersebar namun jumlahnya besar, dan 'seni kehadiran'. Dengan melakukan praktik konstan di ruang publik, meskipun tersebar, perempuan Aceh mampu mendominasi praktik di ruang tersebut, membuat tuntutan, dan menormalkan tindakan mereka. Praktik ini juga membantu mereka mengguncang norma patriarkal, menciptakan efek yang lebih besar ketika terjadi dalam jumlah besar. 'Seni kehadiran' mengacu pada keberanian dan kreativitas perempuan dalam menegakkan kehendak kolektif, mengatasi hambatan, dan menemukan ruang baru untuk mengaktualisasikan diri mereka. Dengan menggunakan 'seni kehadiran', perempuan non-gerakan secara perlahan merebut posisi dari struktur patriarki, sambil membangun momentum untuk perubahan lebih lanjut (Bayat, 2013).

Kedai Kopi: Studi Kasus *non-gerakan*

Sebelum bencana pada tahun 2004, kondisi warung kopi di Aceh dijelaskan oleh pengamatan antropologis Siapno dari awal hingga pertengahan tahun 1990-an. Dia menjelaskan bahwa:

“Di daerah pedesaan di Pidie, saya kaget menemukan perempuan duduk dan minum kopi di warung kopi umum. Di kota-kota urban seperti Banda Aceh dan Lhokseumawe, warung kopi telah berubah menjadi ruang eksklusif untuk pria, ada aturan tidak tertulis bahwa perempuan tidak diizinkan. Jarang bagi perempuan untuk berani masuk ke warung kopi yang didominasi oleh pria. Setelah tinggal di Pidie, saya menemukan bahwa jenis segregasi berdasarkan jenis kelamin ini jauh lebih umum di daerah perkotaan dan hampir tidak ada di daerah pedesaan. Salah satu kegiatan favorit saya ketika tinggal di Sigli adalah mengendarai sepeda setiap pagi sekitar pukul 6 pagi ke pasar lokal di tepi laut. Saya akan berbelanja sebelum pergi duduk di warung untuk minum kopi. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa saya lakukan di Banda Aceh; di kota, perempuan tidak duduk sendirian di warung kopi. Dengan urbanisasi, peran dan ruang publik perempuan telah tergerus dan perempuan menjadi terbatas pada ruang domestik. Sementara pria dapat berdebat dan berdiskusi di warung kopi, perempuan memiliki sedikit forum publik untuk membahas peristiwa-peristiwa saat ini (Siapno, 2013).

Dalam analisis Siapno, adalah proyek modernitas negara Indonesia yang terwujud dalam proses urbanisasi dan globalisasi yang menciptakan ketidaksesuaian semacam itu antara tempat perkotaan dan pedesaan di Aceh. Proses tersebut, daripada membawa perbaikan untuk status perempuan, menurutnya, justru meningkatkan budaya patriarki, segregasi jenis kelamin, dan diskriminasi di kota-kota urban. Karena dia percaya bahwa "budaya matrifokal Aceh dan sistem kepercayaan asli jauh lebih memerdekakan dalam hal praktik kebebasan, daripada jenis nilai 'modern' yang dipaksakan oleh negara atas nama 'pembangunan' (Siapno, 2013).

Di Banda Aceh dan juga di banyak wilayah lain di Aceh saat ini, warung kopi tidak lagi menjadi ruang eksklusif untuk pria, melainkan menjadi ruang heteroseksual di mana baik pria maupun perempuan menduduki dan mendapat manfaat dari ruang tersebut. Transformasi itu mungkin dimulai tiga tahun setelah bencana. Dan sangat mungkin bahwa aktivis NGO

perempuanlah yang mulai mengunjungi dan tinggal di warung kopi baik untuk kesenangan maupun tujuan kerja.

Setidaknya ada dua alasan mengapa aktivis perempuan ini berhasil menduduki warung kopi di Banda Aceh. Pertama, karena posisi mereka sebagai pekerja bantuan yang bekerja untuk lembaga-lembaga internasional atau nasional untuk membantu rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh, mereka mendapatkan status 'istimewa' di mata orang Aceh. Kedua, banyak pria Aceh di Banda Aceh akan mengasumsikan bahwa karena mereka duduk di warung kopi, maka mereka pasti bukan orang Aceh. Akibatnya, mereka tidak akan diganggu atau diinterupsi hanya dengan duduk atau bekerja di warung kopi.

Asumsi seperti itu diungkapkan oleh Azwardi, seorang dosen di Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh, dalam surat kabar lokal yang terkenal, Serambi Indonesia (Azwardi, 2011). Dan kemudian mengikuti pekerja bantuan, banyak perempuan, baik yang bermigrasi dari daerah pedesaan atau tinggal di Banda Aceh, juga mulai menduduki warung kopi dengan berbagai alasan; belajar, bekerja, menggunakan internet nirkabel gratis, dan menikmati waktu luang dengan teman-teman atau dengan kekasih romantis mereka.

Kehadiran mereka yang konstan menciptakan efek domino di Banda Aceh. Pemilik warung kopi, menyadari 'pelanggan baru' mereka, kemudian mulai meningkatkan variasi menu, selain kopi, untuk menarik lebih banyak pelanggan. Mereka juga mendesain ulang warung kopi mereka untuk terlihat lebih modern dan ramah perempuan dengan menyediakan toilet terpisah berdasarkan jenis kelamin atau ruang bebas asap rokok. Pemerintah Aceh, khususnya Dinas Pariwisata, mengadakan 'Putri Kopi Aceh' dengan tujuan mempromosikan kopi Aceh ke khalayak lebih luas di luar Aceh (Nur, 2012).

Kehadiran perempuan di ruang publik, khususnya di warung kopi, dihadapi oleh pria dan kemudian diatur oleh negara. Meskipun pria Aceh tidak menentang mereka secara langsung, mereka menyatakan protes mereka melalui surat kabar lokal yang dimulai pada tanggal 27 April 2011. Dalam esainya yang berjudul "*Inong Bak Keude Kupa (Perempuan di Warung Kopi)*" Azwardi mengeluhkan perilaku perempuan di warung kopi. Dia terganggu dengan cara perempuan duduk terlalu dekat dengan teman pria mereka sambil tertawa keras di warung kopi yang penuh asap dan kebisingan.

Menurut pandangannya, perempuan seharusnya berada di rumah sehingga mereka dihormati (Jufrizal, 2011). Mengikuti esai tersebut, serangkaian tanggapan juga dipublikasikan di Serambi Indonesia baik mengkritik posisi Azwardi atau memperpanjang argumen Azwardi (Arif, 2011). Selain itu, merespons peningkatan jumlah kehadiran perempuan di ruang publik terutama di tempat-tempat wisata dan warung kopi, Illiza Sa'uddin, Wali Kota Banda Aceh (2014-2017) menyatakan instruksi jam malam untuk perempuan mulai pukul 11 malam pada tahun 2015. Setelah diejek dan dikritik di berbagai platform media sosial, dia membela bahwa instruksi tersebut bertujuan untuk melindungi perempuan dari pelanggaran apa pun yang mungkin membahayakan mereka di malam hari. Di tahun 2018, pemerintah Bireuen, sebuah kecamatan di bagian Utara Aceh, juga menyatakan regulasi yang melarang laki-laki dan perempuan yang tidak berhubungan darah (non-mahram) untuk duduk di meja yang sama di warung kopi (WBNA, 2015).

Di tengah kritik-kritik, instruksi jam malam, dan regulasi, perempuan Aceh terus hadir di warung kopi dan banyak tempat publik lainnya, sehingga mengabaikan kritik dan regulasi tersebut. Kehadiran mereka yang konstan berhasil mengubah banyak ruang publik di Aceh.

KESIMPULAN

Secara kesimpulannya, artikel ini telah menunjukkan bagaimana perempuan Aceh berhasil mengubah ruang publik di Aceh, dengan warung kopi sebagai studi kasus. Kemampuan mereka untuk melakukan hal ini dapat disandarkan pada berbagai faktor budaya, politik, dan ekonomi, yang dipicu oleh program rekonstruksi dan rehabilitasi pasca-bencana.

Nilai-nilai matrifokal yang berakar dalam budaya Aceh secara historis memberikan perempuan kesempatan yang relatif egaliter, terutama di pedesaan di mana mereka dapat bergerak antar ruang dengan lebih leluasa. Penyelesaian konflik Indonesia-Aceh pada 2005 membuka peluang rekonstruksi oleh lembaga internasional dan nasional, yang meningkatkan ekonomi Aceh dan menciptakan peluang kerja baru di perkotaan.

Bencana tersebut juga memperkuat narasi perbaikan Aceh, mendorong migrasi pria dan wanita ke pusat-pusat perkotaan seperti Banda Aceh demi

peningkatan ekonomi dan ketakwaan yang lebih besar. Migrasi ini menghasilkan perubahan sosial di Aceh. Transformasi perempuan Aceh terhadap ruang publik dipahami melalui konsep non-gerakan, di mana tindakan mereka didorong oleh praktik sehari-hari. Dengan secara konsisten menghadiri warung kopi, yang sebelumnya merupakan domain laki-laki, mereka membuat kehadiran mereka menjadi norma dan memaksa pemilik warung kopi dan pemerintah untuk menyesuaikan diri.

Meskipun menghadapi kritik dan regulasi dari pemerintah Aceh, keberanian perempuan Aceh untuk tetap hadir di ruang publik telah membawa perubahan signifikan, menantang norma gender tradisional dan membuka jalan bagi inklusivitas gender dan kesetaraan yang lebih besar dalam masyarakat Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianty, D. (2015). *Women and Sharia Law in Northern Indonesia: Local Women's NGOs and The Reform of Islamic Law in Aceh*. Routledge.
- Arif, A. (2011). Kontest 'Ratu-Ratuan' di Aceh. *Serambi Indonesia*.
- Azwardi. (2011). Inong Bak Keude KUPI. *Serambi Indonesia*.
- Balawyn, J. (2017). *The Post-Tsunami Paradox of Female Empowerment in Aceh*. The Conversation. Retrieved from <https://theconversation.com/the-post-tsunami-paradox-of-female-empowerment-in-aceh-88864>
- Banda Aceh dalam Angka Tahun 2008. (2008). BPS Kota Banda.
- Bayat, A. (2013). *Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East*. Stanford University Press. Retrieved from: <https://www.sup.org/books/title/?id=22414>
- Brenner, S., George, A. C. W., & M., K. . (2005). *Islam and Gender Politics in Late New Order," in Spiritied Politics: Religion and Public Life in Contemporary Southeast Asia*. Cornell University Press. Retrieved from <https://www.degruyter.com/document/doi/10.7591/9781501719486-006/html?lang=en>
- Creswell, J. (2015). *Riset Pendidikan: Pendidikan, Perencanaan dan Evaluasi, Riset Kualitatif dan Kuantitatif*. Terj. Helly Prajitno Soetjipto dkk. Pustaka Pelajar.
- Daly, P., Feener, R. M., & Reid, A. J. (Eds.). (2012). *From the ground up: Perspectives on post-tsunami and post-conflict Aceh*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Darussalam, P. (2018). Aceh 2018: Makin Gelap dan Sempit? Catatan Akhir Tahun 2018. *Poros Darussalam*.
- Jufrizal. (2011). Hikayat Inong Keude KUPI (Catatan Untuk Azwardi). *Serambi*

- Indonesia. Retrieved from <http://jufrizal.blogspot.com/2011/08/hikayat-inong-keude-kupi-catatan-untuk.html>.
- Khan, S. B. A. L. (2018). *Sovereign Women in a Muslim Kingdom*. Flipside Digital Content Company Inc.
- Lee-Koo, K. (2012). Gender at the Crossroad of Conflict: Tsunami and Peace in Post-2005 Aceh. *Feminist Review*, 101(1), 59–77. DOI: <https://doi.org/10.1057/fr.2011.54>
- Mardhiah, A., Hidayat, D. R., Rahmat, A., & Sjafirah, N. A. (2018). *The Composition of Women Parliament Members Presence in Local Parliament in Aceh (A Case Study at Provincial Parliament of Aceh Province During the Period of 2014 to 2019)* (pp. 295–301). DOI: <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-793-1-00076>
- Nur, Z. A. M. (2012). Ini Dia Finalis Putri Kopi Indonesia dari Banda Aceh. *Serambi Indonesia*. Retrieved from <http://aceh.tribunnews.com/2012/05/14/ini-dia-finalis-putri-kopi-indonesia-dari-banda-aceh>
- Sambijantoro, S., & Simanjuntak, H. (2015). Aceh Sees Economic Miracle after Tsunami. *The Jakarta Post*. Retrieved from <https://www.thejakartapost.com/news/2014/12/22/aceh-sees-economic-miracle-after-tsunami-0.html-0>
- Samuels, A. (2016). *Hikmah and Narratives of Change: How Different Temporalities Shape the Present and the Future in Post-Tsunami Aceh in Islam and the Limits of the State* (R. M. Feener, D. Kloos, & A. Samuels (Eds.)). BRILL. DOI: <https://doi.org/10.1163/9789004304864>.
- Siapno, J. A. (2013). *Gender, Islam, Nationalism and the State in Aceh: The Paradox of Power, Co-optation and Resistance*. Routledge.
- Srimulyani, E. (2010). Islam, Adat, and the State: Matrilocality in Aceh Revisited. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 48(2), 321–342. DOI: <https://doi.org/10.14421/ajis.2010.482.321-342>.
- Suryakusuma, J. I. (1988). *State Ibuism: The social Construction of Womanhood in the Indonesian New Order*. Institute of Social Studies.
- Tanner, N. (1974). Matrilocality in Indonesia and Africa and Among Black Americans. *Women, Culture and Society*, 129–156.
- WBNA. (2015). *Illiza Sebut Jam Malam Untuk Lindungi Perempuan*. Pemerintah Kota Banda Aceh. Retrieved from <https://bandaacehkota.go.id/berita/5252/illiza-sebut-jam-malam-untuk-lindungi-perempuan.html>.
-

Copyright Holder :

© Baiquni Hasbi (2023).

First Publication Right :

© Saree: Research in Gender Studies

This article is under:

